

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusunlah LKj Tahunan Bankesbangpol Provinsi Jambi.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan dan Politik Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di bidang Kesatuan dan Politik sebagai tolak ukur pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan dan Politik Tahun 2016-2021.

LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Pemerintah dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membangun Negara dan bangsa sendiri, dalam rangka hal tersebut diperlukan Akuntabilitas di setiap instansi Pemerintahan. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan di dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan Akuntabilitas sebagai salah satu aspek umum penyelenggaraan Negara adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategik organisasi; yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja ; penetapan pengukuran kinerja ; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sistem AKIP merupakan suatu proses hidup yang memerlukan peninjauan

dan perbaikan terus menerus sehingga tidak berhenti pada satu titik disebabkan kondisi organisasi baik internal maupun eksternal yang terus berkembang baik masa kini maupun masa mendatang.

Keluaran utama dari sistem Akuntabilitas kinerja adalah laporan Kinerja. Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik (*Feed back*) bagi para penyelenggara pemerintah. Laporan Akuntabilitas kinerja memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan, dan unsur perencanaan. Informasi yang dimaksud tidak hanya bersifat masa lalu (*historical*), akan tetapi juga mencakup status masa kini, dan bahkan masa mendatang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagai salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara, khususnya sebagai upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang, terarah serta usaha yang maksimal dari setiap aparat, untuk berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk laporan Kinerja (LKj) Kesbangpol.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis 2016-2021 sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Jambi, khususnya LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan

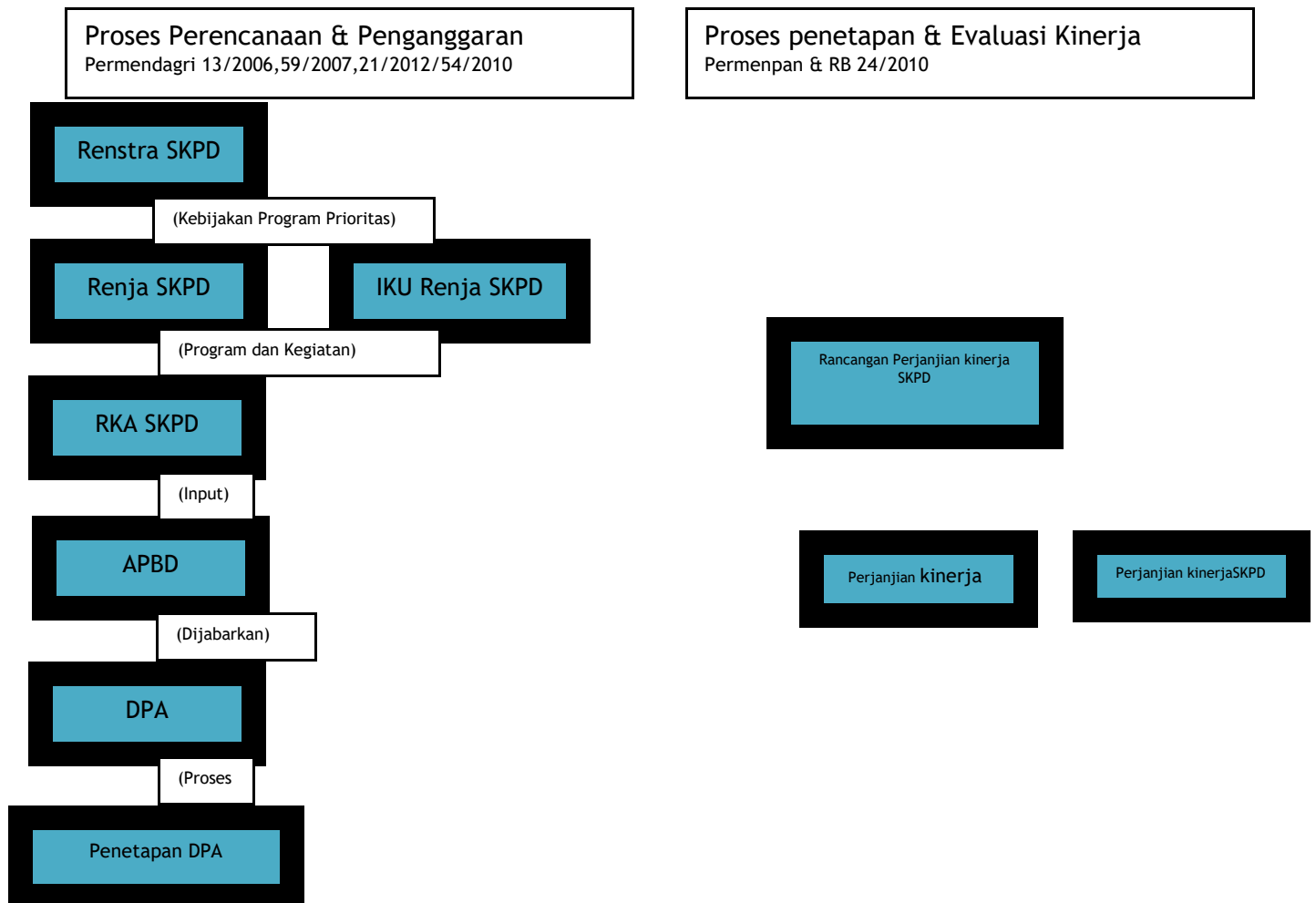
sebagai penyajian data real, baik data mengenai target maupun realisasi kinerja.

Evaluasi kinerja mandiri dan analisis yang diuraikan pada LKj ini akan diarahkan pada evaluasi dan analisis terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan SAKIP Badan Kesbang dan Politik.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Pengukuran Kinerja ini sangat penting untuk melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh.

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan Masyarakat). Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Gambar 1.1 Jadwal Proses Perencanaan, Penganggaran dan LKJ



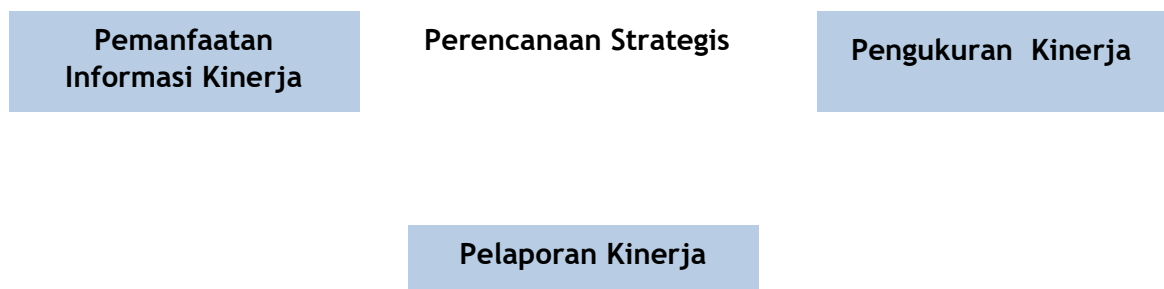
Sistem Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan tatanan instrumen dan metode pertanggung jawaban yang intinya meliputi tahapan

1. Penetapan Perencanaan Strategik
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

Siklus laporan kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Siklus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Dari Skema gambar diatas, dijelaskan tujuan dan Manfaat penyusunan serta penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2018 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** merupakan aspek bagi keperluan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang menjadikan LKj Tahun 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2018 dan mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kebijakan yang transparan dengan esensi

capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh visi, misi, dan tujuan / sasaran strategik yang telah dicapai.

b. Aspek Manajemen Kinerja merupakan aspek bagi keperluan Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang menjadikan LKj Tahun 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi upaya-upaya perbaikan di masa datang dan merumuskan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3.Kedudukan dan Dasar Hukum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 Tentang uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

1.4.Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2008 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, maka tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5.Struktur Organisasi

Sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2008, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Yaitu :

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Partisipasi Politik.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.
- d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan.
- e. Bidang Penanganan Konflik.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 mengatur bahwa Sekretaris dan 4 (empat) Bidang sebagaimana yang tertera dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008, masing-masing mempunyai tugas pokok dan f

fungsi untuk dapat melaksanakan Tupoksi dimaksud, secara struktural dibantu oleh beberapa Sub Bagian/Bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badang Kesatuan bangsa dan Politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Membuat perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - c. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;
 - d. Mengelola perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan surat menyurat tata usaha pimpinan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola urusan administrasi kepegawaian, barang, perawatan dan pemeliharaan Inventaris Kantor;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas dan keamanan kantor;
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan Badan Kesbangpol;
 - d. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
 - e. Menyiapkan usulan pengangkatan bendaharawan;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2 Sub Bagian Keuangan.

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan penyusunan rencana anggaran;
 - b. Melaksanakan penanganan administrasi keuangan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - d. Melaksanakan urusan kas dan gaji;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3 Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- (1) Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan bahan evaluasi, penyusunan program dan penyusunan rencana kerja Badan Kesbangpol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, meng sistimasi kan data dan penyusun rencana serta program kerja;
 - b. Menganalisa data hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan laporan;
 - c. Menyusun data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan tugas Badan Kesbangpol;

e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Bidang Partisipasi Politik

- (1) Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Kesbangpol di bidang Fasilitasi dan pengembangan, Partisipasi politik dan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Partisipasi Politik mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi Pemilihan Umum;
 - c. Menyiapkan perumusan kebijakan komunikasi politik dan Sosialisasi Undang-undang politik;
 - d. Merumuskan kebijakan pengembangan etika politik, pendidikan politik;
 - e. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan budaya politik;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Partisipasi Politik Terdiri dari :

2.1 Sub Bidang Partisipasi Politik

- (1) Sub Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan partisipasi politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang partisipasi politik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan penyiapan program kerja yang berkaitan dengan fasilitasi pemilihan umum dan pilkada;
 - c. Monitoring dan evaluasi situasi politik daerah;

d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sub Bidang Budaya Politik

(1) Sub Bidang Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang budaya politik mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan program kerja tentang komunikasi politik dan sosialisasi Undang-undang politik;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan etika politik dan pendidikan politik;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan budaya politik;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

(1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perkuatan pengembangan wawasan kebangsaan, memfasilitasi dan pembinaan pembauran bangsa, meningkatkan kesadaran bela negara serta resapan ideologi Negara di kalangan masyarakat dalam rangka tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- b. Melaksanakan dan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di lingkungan masyarakat;

- c. Melakukan peningkatan dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- d. Melakukan pemasyarakatan pembauran kebangsaan dalam rangka integrasi masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam proses penyiapan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bela negara;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :

3.1 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan kewarganegaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - b. Melaksanakan kegiatan interaksi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pembauran dan perekonomian;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2 Sub Bidang Bela Negara

- (1) Sub Bidang Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bela negara, ideologi dan kewaspadaan Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Bela Negara mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara;

- b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan ideologi dan kewaspadaan nasional;
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
- 4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan.
 - (1) Bidang fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan fasilitasi organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Masyarakat dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijakan, memfasilitasi dan pengawasan terhadap organisasi partai politik, masyarakat, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi profesi dan masyarakat;
 - c. Melakukan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
 - d. Melakukan evaluasi, komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait organisasi politik, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
 - e. Memfasilitasi lembaga perwakilan;
 - f. Melakukan sosialisasi kebijakan peraturan organisasi masyarakat dan politik;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan terdiri dari :

4.1 Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Lembaga Perwakilan

- (1) Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan persiapan kebijakan perumusan dan fasilitas partai politik dan organisasi profesi serta lembaga-lembaga perwakilan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan persiapan kebijakan perumusan fasilitas partai politik, organisasi profesi dan lembaga perwakilan;
 - b. Melakukan kerja sama, komunikasi, konsultasi dengan parpol;
 - c. Melakukan evaluasi pengawasan berkaitan dengan kegiatan partai politik;
 - d. Melaksanakan kegiatan fasilitas organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga perwakilan;
 - e. Mengumpulkan, mengolah data yang berhubungan dengan organisasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2 Sub Bidang Organisasi Masyarakat , LSM dan Keagamaan.

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitas dan pengembangan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang organisasi keagamaan dan Lembaga swadaya masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;

- b. Melakukan komunikasi koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan, LSM dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penanganan Konflik

- (1) Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesbangpol di bidang penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan analisis potensi konflik;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi koordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan konflik;
 - c. Melaksanakan penanganan konflik yang bersumber dari kegiatan sosial, ekonomi, dan lalu lintas orang asing;
 - d. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintah;
 - e. Melaksanakan evaluasi, koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam memelihara stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :

5.1 Sub Bidang Analisis Potensi Konflik

- (1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan yang menyangkut kebijakan fasilitas analisis potensi konflik, fasilitasi rekonsiliasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Potensi Konflik mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan fasilitasi, analisis potensi konflik yang bersumber dari kerawanan sosial;
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dengan penanganan berbagai konflik sosial;
- c. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.2 Sub Bidang Konflik Pemerintah dan Keamanan

- (1) Sub bidang konflik pemerintahan dan keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan fasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi konflik pemerintahan dan keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan keamanan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijakan memfasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat konflik pemerintahan dan keamanan.
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan memfasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;
 - c. Melaksanakan rekonsiliasi mentalitas masyarakat secara utuh guna menumbuhkan kembangkan kembali semangat kebersamaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Melakukan evaluasi dan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.6 Sumber Daya Aparatur

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang. 38 (tiga puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 (dua belas) orang tenaga honorer, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural 17 Orang.
2. Staf/Pelaksana 38 Orang.
3. Tenaga Honorer 12 Orang.

Secara keseluruhan komposisi jabatan, memuat susunan struktural Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------|------------|
| 1. Eselon I | = - Orang |
| 2. Eselon II | = 1 Orang |
| 3. Eselon III | = 5 Orang |
| 4. Eselon IV | = 11 Orang |
| 5. Non Eselon | = 50 Orang |

Tabel 1.1
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	SD	-	-	-
2	S L T P	-	-	-
3	S L T A	12 Orang	17,91 %	PNS Daerah
4	D.III	2 Orang -	2,98 %	Sda
5	S.I	43 Orang	64,17 %	Sda
6	S.II	10 Orang	14,92 %	Sda
7	S.III	-	-	-
	Jumlah	67 Orang		

Tabel 1.2
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Golongan

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	I.c	-	-	-

4	I.d	-	-	-
5	II.a	-	-	-
6	II.b	-	-	-
7	II.c	2 Orang	2,9 %	PNS Daerah
8	II.d	3 Orang	4,47 %	Sda
9	III.a	5 Orang	7,46 %	Sda
10	III.b	15 Orang	22,38 %	Sda
11	III.c	10 Orang	14,92 %	Sda
12	III.d	15 Orang	22,38 %	Sda
13	IV.a	9 Orang	13,43 %	Sda
14	IV.b	7 Orang	10,44 %	Sda
15	IV.c	-	-	-
16	IV.d	1 Orang	1,49 %	Sda
17	IV.e	-	-	-
	Jumlah	67 Orang	-	-

Gambar 1.3
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Tingkat Pendidikan

Gambar 1.4
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Berdasarkan Golongan

Gambar 1.5

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROV. JAMBI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2008**



Kelompok Jab. Fungsional			

SEKRETARIS

Kasubbag Keuangan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Ren. Monev & pelaporan
--------------------------	--------------------------------------	--

Bidang Fasilitasi Politik	Bid. Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	Bid. Fasilitasi OPK dan LP	Bid. Penanganan Konflik
Subbid Partisipasi Politik	Subbid Wawasan Kebangsaan	Subbid Fasilitasi Parpol & LP	Subbid Konflik Pem, Keamanan
Subbid Budaya Politik	Subbid Bela Negara	Subbid LSM, Ormasy dan Keagamaan	Subbid Analisis Potensi Konflik

1.5 Sistematika Penyusunan LKj Tahun 2018

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan berdasarkan data hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018, dan sesuai dengan Selain itu laporan ini bersumber dari pembiayaan yang bersifat Strategik yang dimaksudkan adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategik dalam kaitannya

dengan tugas pokok dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sementara itu dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tetapi tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2018 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Analisis dan capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas gambaran tentang latar belakang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dan penjabaran tujuan dan Manfaat penyusunan serta penyampaian LKj 2018.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA, Menjelaskan rencana strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk periode 2016-2021 dan rencana kinerja Tahun 2018.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA, Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selama Tahun 2018 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut serta menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategik untuk tahun 2018.

BAB IV - PENUTUP, Menjelaskan Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2018 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jambi merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik, perencanaan yang jelas dan sinergi harus selaras dengan visi dan misi serta mempertahankan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategik yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan kesatuan dan politik Provinsi Jambi. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, inovatif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui program dan kegiatan.

A. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu pernyataan mengenai gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai di masa depan suatu instansi pemerintah untuk dapat berkarya, tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk menuju cita dan citra yang ingin diwujudkan. Untuk mewujudkan cita dan citra tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan

Visi :

"Terwujudnya kondisi Politik Daerah , Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif dalam Wadah Kesatuan Bangsa Menuju Jambi Tuntas "

Visi diatas mengandung semangat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk menciptakan keadaan dan kondisi yang lebih baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi merupakan sesuatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan, diemban atau dilaksanakan oleh suatu instansi Pemerintah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil melaksanakan program-programnya dengan baik. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan

Misi :

1. Meningkatkan Sistim Politik Daerah yang berbasis Etika dan Budaya Politik.
2. Menumbuhkan Iklim Kehidupan Bangsa yang Demokratis dan Dinamis.
3. Meningkatkan Peran Kelembagaan Demokratis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat.
4. Mewujudkan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari ke empat misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu sampai dengan lima tahunan.

Dalam rangka pengembangan misi guna mencapai visi yang telah dikemukakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan

4 Tujuan dari misi diatas adalah :

1. Mewujudkan situasi politik daerah yang kondusif.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang dinamis.
3. Mewujudkan peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah.
4. Terciptanya situasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Untuk mendukung tujuan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

1. Terwujudnya situasi politik daerah yang kondusif.
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis.
3. Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah.
4. Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif

C. Kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang serta dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang akan ditempuh dalam pelaksanaan Visi Misi Badan kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 4 Kebijakan antara lain :

1. Meningkatkan peran masyarakat melalui pendidikan politik.
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.
3. Pembinaan dan Fasilitasi Ormas, OKP, LSM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat yang kondusif.

D. Program / Kegiatan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran dan target capaian kinerja dari instansi pemerintah yang maksimal baik kerjasama dengan masyarakat maupun Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Visi dan Misi yang diinginkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai 9 program dengan 34 kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.

Sasarannya tersedianya kebutuhan surat menyurat dan kebutuhan rutin serta Kebutuhan operasional dalam tugas sehari-hari.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

Sasarannya tersedianya dan Terpeliharanya Mobilitas, Sarana dan Prasarana Apratur.

3. Program Peningkatan disiplin aparatur.

Sasarannya tersedianya sarana kelengkapan dan perlengkapan dalam melaksanakan tugas.

4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Sasarannya meningkatnya ilmu pengetahuan, kemampuan serta keterampilan aparatur.

5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Sasarannya tercapainya :

- (a.). Perencanaan program dan kegiatan yang serasi sehingga terhimpunnya pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang baik, lengkap dan akurat.

- (b.). Tersinkronnya program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Provinsi Jambi dan Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab/Kota di provinsi Jambi.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sasaran yang akan dicapai pada program ini antara lain :

- (a.). Terciptanya Kerukunan antar etnis dan suku di kalangan masyarakat di Provinsi Jambi.
- (c.). Menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
- (e.). Meningkatkan Kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Jambi.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

- (a.). Meningkatkan Kewaspadaan dini masyarakat melalui kegiatan Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).
- (b.). Terakomodirnya izin rekomendasi penelitian di kalangan mahasiswa dan peneliti asing.
- (c.). Terfasilitasinya penanganan konflik sosial melalui kegiatan Tim Terpadu (TIMDU) di Provinsi jambi.
- (d.). Terpantaunya kegiatan orang asing, lsm asing (NGO) dan lembaga asing di Provinsi Jambi.
- (e.). Terpetanya potensi konflik di provinsi jambi melalui kegiatan pemantau dan pemetaan potensi konflik.
- (f.). Tersosialisasinya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan generasi muda, melalui kegiatan pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba di Provinsi jambi.

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini antara lain :

- (a). Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesadaran berpolitik, pemilih pemula dan Gender melalui kegiatan forum diskusi politik.
- (b). Terlaksananya Rakor Perkembangan dan monitoring Perkembangan pelaksanaan Pemilukada di Daerah Provinsi Jambi.

9. Program Perwujudan Demokrasi yang makin kokoh.

Sasaran yang dicapai pada program ini adalah :

- (a). Tersalurkannya bantuan partai politik kepada Parpol pemenang pemilukada melalui Tim Verifikator.
- (b). Monitoring keberadaan eksistensi dan penyelesaian permasalahan parpol ormas, lsm, okp dan lembaga keagamaan dalam Provinsi Jambi.
- (c). Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan untuk memelihara kesatuan bangsa dalam bidang ideologi, politik ekonomi dan sosial budaya.
- (d). Meningkatkan peran serta Ormas dalam pembangunan di Daerah melalui kegiatan Kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi.

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program/kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jambi telah menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terwujudnya situasi politik daerah yang kondusif.	• Terselenggaranya Rakor Bidang Politik Tahun 2018 dan terpantaunya situasi politik Daerah di Provinsi Jambi. • Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pemilukada	11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi 210 orang peserta 3 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis.	• Terlaksananya penguatan Kesadaran berbangsa dan bernegara menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. • Meningkatnya Pembinaan Etnis dan Suku. • Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jambi. • Meningkatnya rasa patriotisme dan cinta tanah air dikalangan pelajar dan generasi muda.	80 orang peserta di Provinsi Jambi 80 orang peserta di Provinsi Jambi 100 orang peserta 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi 150 orang peserta 3 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi
3. Terwujudnya peran serta	• Meningkatnya kemapanan	100 orang peserta

kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah.	Partai Politik di Provinsi Jambi. • Termonitor dan terevaluasinya keberadaan eksistensi Parpol di Provinsi Jambi. • Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi. • Terjalinnnya kerjasama bidang Kesbangpol dalam Negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi.	dalam Provinsi Jambi 100 orang peserta dalam Provinsi Jambi 575 orang peserta 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi 32 Organisasi Kemasyarakatan 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi
4.Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif	• Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan Tenaga Kerja Asing (TKA), Peneliti/ Tenaga Ahli Asing, Rohaniawan, LSM Asing (NGO) dan lembaga asing di Provinsi Jambi. • T e r l a k s a n a n y a pemantauan dan pembinaan FKDM d Kab/ Kota Provinsi Jambi. • T e r w u j u d n y a pelayanan/penertiban rekomendasi penelitian. • T e r l a k s a n a n y a penanganan konflik oleh Tim Terpadu penanganan konflik sosial. • Terlaksananya koordinasi	Laporan berkala dan insendental 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi Lap.ke Mendagri, Gubernur dan tindaklanjut laporan kepada Bupati/Walikota di Provinsi Jambi 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi Laporan berkala dan insendental Gubernur dan Mendagri 11 Kab/ Kota dalam Provinsi Jambi. 60 orang peserta 11

	pemantauan dan fasilitasi pasca konflik di Provinsi Jambi. • Terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi	Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. Laporan berkala dan insendental Gubernur dan Mendagri
--	---	--

Jumlah Anggaran :

Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp . 920.945.580,-
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 1 096.766.613,-
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp. 1. 000.308.200,-
Program Demokrasi yang makin kokoh	Rp. 1. 806.971.290 ,-

Jambi, Januari 2018

Plt.Gubernur Jambi

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi
Jambi

H. FACHRORI UMAR

Drs. H. M. Asnawi. AB,MM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai tugas Pokok "*Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik*" sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi membantu Gubernur dalam Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Partisipasi Politik, Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok diatas, sejalan perubahan dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis.

Dalam rangka pencapaian kinerja, Badan Kesbangpol Provinsi Jambi mengacu pada Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021 yang merupakan turunan dari RPJMD Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, dimana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi Ketiga** Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

“Menjaga Situasi Daerah yang Kondusif, Toleransi antar Umat Beragama dan Kesadaran Hukum Masyarakat”.

Dari misi ketiga tersebut, sasaran yang ingin di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Melalui Kerukunan Antar Suku dan Antar Umat Beragama.

Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu:

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

2. Meningkatkan Pengendalian Terhadap Konflik Sosial di Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu:

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2016-2021, dalam tabel 3.7 disajikan Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap Tujuan dan Sasaran, selain itu juga dapat dijelaskan Program-program, target, dan rencana pendanaan Bankesbangpol yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 Menuju Jambi Tuntas, dalam Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Visi : Terwujudnya Kondisi Politik Daerah, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif Dalam Wadah Kesatuan Bangsa Menuju Jambi Tuntas			
Misi 1 : Meningkatkan Sistem Politik Daerah Yang Berbasis Etika dan Budaya Politik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan Situasi Politik Daerah Yang Kondusif	Terwujudnya Situasi Politik Daerah Yang Kondusif	Menciptakan Pemahaman masyarakat Tentang Pemilu dan Pemilukada	Meningkatkan Peran Masyarakat Melalui Pendidikan Politik
Misi 2 : Menumbuhkan Iklim Kehidupan Bangsa Yang Demokrasi dan Dinamis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Mengembangkan Fungsi dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan	Revitalisasi FKUB sehingga Dapat Menjadi Lembaga yang Optimal Bagi Para Tokoh Agama, Masyarakat dan Pemerintah.

Misi 3 : Meningkatkan Peran Kelembagaan Demokrasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Peran Serta Kelembagaan Demokrasi Dalam Pembangunan Daerah	Terwujudnya Peran Serta Kelembagaan Demokrasi Dalam Pembangunan Daerah	Meningkatkan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Ormas, OKP, LSM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
Misi 4 : Mewujudkan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Situasi Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif	Terwujudnya Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif	Meningkatkan Sistem Peringatan Dini, Cegah Dini, Tangkal Dini terhadap Potensi Konflik	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam menjaga situasi dan Kondisi yang kondusif.



Tabel 3.2

**Rencana Program dan Pendanaan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
Yang Mengacu Pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021**

No.	Jenis urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)	Capaian Kinerja awal RPJMD (2015)	Rencaa Program dan Pendanaan														SPENAN JA
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kinerja pada akhir periode RPMD		
				Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	
1.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Aspek Indeks kebebasan berkeyakinan	76,67%	80,47 %	254	84,27 %	260,0	88,07 %	270,0	91,87 %	280,0	95,67 %	290,0	99,47 %	300,0	99,47 %	1654	Ba Kesb
		Aspek Indeks kebebasan dari deskriminasi	96,70%	97,25 %	1.120	97,80 %	1.188,0	98,35 %	1.255,0	98,90 %	1.325,0	99,45 %	1.395,0	100 %	1.465,0	100 %	7748	
2.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Nilai RAD Penanganan Konflik Sosial	Sangat Baik	Sangat Baik	709	Sangat Baik	810,0	Sangat Baik	870.0	Sangat Baik	930,0	Sangat Baik	980,0	Sangat Baik	1.040.6	Sangat Baik	5.339,286	Ba Kesb
		Persentase potensi konflik sosial yang difasilitasi	97%	97.5%	361	98%	632,0	98.5%	667,0	99%	702,0	99.5%	737,0	100%	772,0	100%	3871,41	
		Penyelesaian Penanganan Konflik Suku Anak dalam (konflik)	1	1	350	2	500.0	3	650,0	4	800,0	5	900,0	6	1.050,0	6	4250	
3.	Program Pendidikan politik	Partisipasi politik masyarakat	66,43%	66,43 %	807	67,02 %	846,6	68,40 %	886,6	69,02 %	926,6	69,90 %	966,6	70,50 %	1.066,0	70,50 %	5499	Ba Kesb

	masyarakat	pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada																
4.	Program perwujudan demokrasi makin kokoh	Persentase Ormas Aktif dalam pelaksanaan pembangunan	31%	43%	2.765	55%	3.191,5	67%	3.510,7	79%	3.861,7	91%	4.247,9	100%	4.672,7	100%	22249,426	Ba Kesb
		Persentase peningkatan peran politik perempuan	0%	24%	-	40%	150,0	56%	165,0	72%	181,5	88%	199,7	100%	219,6	100%	915,765	

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berikut target capaian selama 5 (lima) Tahun.

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Aspek Hak-hak Politik	54,01	57,3	60,59	63,88	67,17	70,46	73,75	
2	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	84,95	87,95	89,95	92,45	94,95	97,45	97,45	
3	Indeks Institusi Demokrasi	74,34	78,54	82,74	86,94	91,14	95,34	95,34	
4	Nilai Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2016-2021, oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, Tertuang dalam Rencana Pembangunan tahap ke III RPJM (Tahun 2015-2019), dalam Tahap ini Renstra Kesbangpol menempatkan fokus pada :

- a) Upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama serta peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat masih merupakan prioritas pembangunan bidang keagamaan pada periode ini :
 - 1. Dalam konteks mewujudkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama, dilakukan dengan dialog-dialog secara berkesinambungan untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda tersebut.
 - 2. Dalam konteks meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan melalui pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan fasilitasi kepada lembaga-lembaga keagamaan. Pengamalan agama pada tahap ini diharapkan tidak hanya meningkat

pada tataran kehidupan bermasyarakat, tetapi juga penyelenggaraan kehidupan bernegara.

- b) Prioritas pembangunan bidang politik pada tahap ini adalah pada pemantapan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (*civil society*), pemantapan hubungan eksekutif dan legislatif, serta terimplementasikannya rencana induk daerah otonom yang telah disusun pada periode sebelumnya.
- c) Pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun hubungan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala SKPD setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Provinsi Jambi, Dengan demikian dapat terjalin keserasian dan kesinambungan perencanaan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Guna mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan untuk menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif ,tertib ,aman dan damai untuk menuju JAMBI TUNTAS 2016-2021 Badan Kesbangpol telah menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Bankesbangpol Provinsi Jambi

guna mendukung kinerja setiap Program dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun yang dapat dilihat dari tabel RENSTRA berikut ini :



Tabel 3.4

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir period Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)		
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Kesbangpol Prov.Jambi.				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	74	80	1.626.719	84	1.439.499	88	1.641.029	92	1.870.773	96	2.132.682	100	2.431.257	100%		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur (%)	70	75	625.174	80	1.218.950	85	926.792	90	950.811	95	1.093.433	100	1.257.448	100%		
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	61 Orang	61 Org	32.000	65 orang	35.840	70 orang	40.140	75 orang	44.957	80 orang	50.352	84 orang	56.394	84 orang		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Peningkatan Kapasitas sumber daya	88 %	90 %	65.000	92 %	75.000	94%	85.000	96%	95.000	98%	105.000	100%	115.000	100%		



LAPORAN KINERJA (LKj) Th. 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JAMBI

					Aparatur	aparatur yang berkualitas														
Terwujudnya Rencana Kerja (Renja) koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan kesbangpol	Tersusunnya Rencana Kerja(Renja) Koordinasi dan tersinkronnya program/kegiatan kesbangpol se Provinsi Jambi				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pencapaian penata usaha keuangan, Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan Kesbangpol	70%	75%	358.773	80%	406.000	85%	456.000	90%	506.000	95%	556.000	100%	616.000	100%
					Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kesbangpol Provinsi Jambi	Tersusunnya rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DPA SKPD, LAKIP, LK PJ, LPPD, Renstra SKPD	9 Buku	11 Buku	96.801	13 Buku	106.000	15 buku	116.000	17 buku	126.000	19 Buku	136.000	21 Buku	156.000	21 Buku
					Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program/kegiatan kesbangpol Provinsi Jambi	Terlaksananya Koordinasi dan rakor sinkronisasi program/kegiatan jaringan kesbangpol Kab/kota se Provinsi Jambi	11 Kab/kota di Provinsi Jambi	11 Kab/kota di Provinsi Jambi	261.972	11 Kab/kota di Provinsi Jambi	3000.000	11 Kab/kota di Provinsi Jambi	340.000	11 Kab/kota di Provinsi Jambi	380.000	11 Kab/kota di Provinsi Jambi	420.000	11 Kab/kota di Provinsi Jambi	460.000	11 Kab/kota di Provinsi Jambi
Mengembangkan Kehidupan Demokrasi yang dinamis	Terwujudnya Kehidupan Demokrasi yang dinamis	<i>Indeks Aspek Kebebasan Sipil</i>			Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Aspek Indeks kebebasan	76,67%	82,55 %	254.688	68,32 %	260.000	62,94 %	270.000	61,10 %	280.000	62,50 %	290.000	69,01 %	300.000	69,01%
					Kegiatan Pembinaan umat beragama dalam rangka menciptakan	Meningkatnya kerukunan umat beragama di provinsi Jambi	11 Kab/kota	11 kab/kota	254.688	11 kab/kota	260.000	11 kab/kota	270.000	11 Kab/kota	280.000	11 kab/kota	290.000	11 Kab/kota	300.000	11 kab/kota



LAPORAN KINERJA (LKj) Th. 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JAMBI

						keharmonisan antar umat															
						Aspek indeks kebebasan dari deskriminasi	96,70%	87,15 %	1.120.783	73,95 %	1.188.000	83,85 %	1.255.000	81,05 %	3.125.000	81,05 %	1.395.000	83,95 %	1.465.000	83,95%	
					Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan Masyarakat	Meningkatnya pembinaan etnis dan suku	70 Org Peserta	80 Org Peser ta	160.280	90 Org Peser ta	170.000	100 Org Peser ta	180.000	110 Org Peser ta	1990.000	120 Org Peser ta	200.000	130 Peser ta	210.000	140 Org Peserta	
					Kegiatan penguatan Pendidikan wawasan kebangsaan	Terlaksananya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai nilai pancasila, UUD, 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI	80 Org Peserta	80 Org Peser ta	146.797	100 Org Peser ta	155.000	120 org Peser ta	165.000	150 Org Peser ta	175.000	170 Org Peser ta	185.000	190 Org Peser ta	195.000	210 org peserta	
					Kegiatan Peningkatan kesadaran Bela Negara	Meningkatnya rasa patriotisme dan cinta tanah air dikalangan pelajar dan generasi muda	110 Org Peserta	320 Org Peser ta	211.933	330 Org Peser ta	220.000	340	230.000	350	240.000	360	250.000	370	260.000	380.700	
					Kegiatan Dukungan Penyelenggara an TMMD Ke 96 dan Ke 97	Terjalinnnya kerjasama antara Kesbangpol Provinsi Jambi dengan Masyarakat melalui Kegiatan TMMD ke 96 dan ke 97 di 2 Kodim di	400 Org Peserta	400 Org Peser ta	453..000	450 Org Peser ta	483.000	500 Org Peser ta	510.000	550 Org Peser ta	540.000	600 Org Peser ta	570.000	650 Org Peser ta	600.000	700 org Peserta	



LAPORAN KINERJA (LKj) Th. 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JAMBI

					Provinsi Jambi															
					Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di daerah Provinsi	Tersusunnya data penunjang rencana aksi indeks demokrasi indonesia daerah di Provinsi	11 Kab/kota	11 Kab/kota	148.773	11 Kab/kota	160.000	11 Kab/kota	170.000	11 kab/kota	180.000	11 kab/kota	190.000	11 kab/kota	200.000	11 kab/kota
					Kegiatan Peningkatan Jati Diri Bangsa / Nation Character Building.	Meningkatkan Sikap Bela Negara, Nilai-nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air.	120 Orang peserta	130 Orang peserta	240.000	140 Orang peserta	250.000	150 Orang peserta	260.000	160 Orang peserta	270.000	170 Orang peserta	280.000	180 Orang peserta	290.000	200 Orang peserta
Terciptanya Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif	Terwujudnya Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif	<i>Nilai Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik</i>			Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Nilai RAD Penanganan Konflik Sosial	Sangat Baik	Sangat Baik	2.129.812	Sangat Baik	3..888.240	Sangat Baik	5.097.000	Sangat Baik	6.188.000	Sangat Baik	2.273.000	Sangat Baik	8.508.000	Sangat Baik
					Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan Bencana (Permendagri No.12 tahun 2006)	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan FKDM Kabupaten/kota di Provinsi Jambi	330 Org Peserta	480 Orang Peserta	401.645	500 Org Peserta	800.000	520 Org Peserta	1.200.000	540 Org Peserta	1.600.000	560 Org Peserta	2.000.000	580 Org Peserta	2.400.000	600 Org Peserta



LAPORAN KINERJA (LKj) Th. 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JAMBI

					Kegiatan Penertiban/Monitoring/evaluasi dan pelaporan rekomendasi penelitian	Terwujudnya pelayanan/pertimbangan rekomendasi penelitian	11 Kab/kota	11 Kab/kota	48.699	11 Kab/kota	90.000	11 Kab/kota	130.000	11 Kab/kota	170.000	11 Kab/kota	210.000	11 Kab/kota	250.000	11 Kab/kota	
					Kegiatan Tim Terpadu penanganan konflik sosial	Terlaksananya Penanganan konflik oleh Tim Terpadu (TIMDU)	240 Org Peserta	720 Org Peserta	413.726	1.440 Org Peserta	945.000	2.160 Org Peserta	1.345.000	2.880 Org Peserta	1.745.000	3.600 Org Peserta	2.145.000	4.320 Org Peserta	2.545.000	5.040 Org Peserta	
					Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing	Terlaksananya pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing, peneliti/tenaga ahli asing, rohaniawan, LSM Asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	120 Org Peserta	120 Org Peserta	183.228	130 Org Peserta	193.000	140 Org Peserta	203.000	150 Org Peserta	213.000	160 Org Peserta	223.000	170 Org Peserta	233.000	180 Org Peserta	
					Kegiatan Pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi	Terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi	120 Org Peserta	120 Org Peserta	158.690	180 Org peserta	198.000	240 Org Peserta	238.000	300 Org Peserta	318.000	360 Org Peserta	358.000	420 Org Peserta	398.000	480 org Peserta	
					Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Kader Revolusi	Terbentuknya Kader Revolusi Mental Tingkat Provinsi dan Kab/Kota.	N/A	-	-	80 orang /2 angkatan	500.000	90 orang /2 angkatan	520.000	100 orang /2 angkatan	530.000	110 orang /2 angkatan	540.000	120 orang /2 angkatan	550.000	130 orang/2 angkatan	



LAPORAN KINERJA (LKj) Th. 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JAMBI

						Mental Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jambi																
							Persentase potensi konflik yang difasilitasi	97%	97,5 %	361.412	98%	632.700	98,5 %	667.000	99%	702.000	99,5 %	737.000	100%	772.000	100%	
						Kegiatan Pementauan dan Pemetaan potensi konflik di Provinsi Jambi	Terlaksananya pemantauan dan pemetaan potensi konflik di Provinsi Jambi	60 Org Peserta	60 Org Peserta	161.412	80 Org Peserta	176.000	100 Org Peserta	191.000	120 Org Peserta	206.000	140 Org Peserta	221.000	160 Org Peserta	236.000	180 Org Peserta	
						Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi	Terfasilitasinya penyelesaian konflik Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi	-	3 Potensi konflik SAD yang difasilitasi	200.000	7 Potensi Konflik SAD yang difasilitasi	456.700	9 Potensi konflik SAD yang difasilitasi	476.000	11 Potensi Konflik yang difasilitasi	496.000	13 potensi konflik yang difasilitasi	516.000	14 Potensi konflik yang difasilitasi	536.000	14 Potensi konflik yang difasilitasi	
Mewujudkan Situasi Politik Daerah yang Kondusif.	Terwujudnya Situasi Politik Daerah yang Kondusif.	Indeks Aspek Hak-hak Politik				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu dan pilkada	66,43%	66,43 %	806.600	67,02 %	846.600	68,40 %	886.600	69,02 %	926.600	69,90 %	966.600	70,50 %	1.066.000	70,50%	
						Kegiatan Koordinasi forum diskusi politik	Partisipasi Politik Masyarakat, Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pemilu/pilkada	66,43% 320 Orang Peserta	320 Org Peserta	280.603	350 Org Peserta	300.000	380 Org Peserta	320.000	410 Org Peserta	340.000	440 Org Peserta	360.000	470 Org Peserta	380.000	500 Org Peserta	
						Kegiatan Monitoring,	Terselenggara nya Rakor	11 Kab/kota	11 Kab/k	526..003	11 Kab/k	546.600	11 Kab/k	566.600	11 Kab/k	586.600	11 Kab/k	606.600	11	686.000	11	



LAPORAN KINERJA (LKj) Th. 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JAMBI

					evaluasi dan rakor perkembangan Politik Daerah	Bidang Politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di Provinsi Jambi		ota		ota		ota		ota		ota		Kab/k ota		Kab/kot a	
Mewujudkan Peran Serta Kelembagaan Demokrasi Dalam Pembangunan Daerah	Terwujudnya Peran Serta Kelembagaan Demokrasi Dalam Pembangunan Daerah	<i>Indeks Institusi Demokrasi</i>			Program Perwujutan demokrasi yang makin kokoh	Persentase Ormas aktif dalam pelaksanaan pembangunan	31%	43%	3.203.646	55%	3.595.000	67%	3.760.000	79%	3.932.500	91%	4.113.850	100%	4.305.655	100%	
					Kegiatan Peningkatan dan pengembangan kualitas proses politik bagi lembaga parpol	Meningkatnya kemampuan partai politik di Provinsi Jambi	80 Org Peserta	192 Org Peserta	203.646	202 Org Peserta	205.000	212 Org Peserta	210.000	222 Org Peserta	215.000	232 Org Peserta	220.000	242 Org Peserta	225.000	252 Org peserta	
					Kegiatan Monitoring dan evaluasi eksistensi Parpol, Ormas, OKP, dan Lembaga Keagamaan/Pe rwakilan di daerah	Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di Provinsi Jambi	140 Org Peserta	456 Org Peserta	235.000	460 Org Peserta	245.000	476 Org Peserta	255.000	486.000	265.000	496 Org Peserta	275.000	506 Org Peserta	285.000	516 Org Peserta	295.000
					Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, LSM, OKP, dan BEM Provinsi Jambi	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi	140 Org Peserta	600 Org Peserta	340.000	615 Org Peserta	345.000	630 Org Peserta	350.000	645.000	355.000	660 Org Peserta	360.000	675 Org Peserta	365.000	690 org peserta	370.000
					Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol dalam negeri dengan	Terjalinnnya kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan	N/a	68 Ormas	2.425.000	78 Ormas	2.500.000	88 Ormas	2.600.000	98 Ormas	2.700.000	108 Ormas	2.800.000	118 Ormas	2.900.000	128 Ormas	3.000.000



LAPORAN KINERJA (LKj) Th. 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JAMBI

					organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi (Permendagri Nomor 20 Tahun 2013)	organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi														
					Kegiatan Peningkatan dan penetaan Organisasi Kemasyarakatan	Tercitanya data base ormasy dengan baik	-	-	-	48%	150.000	58%	180.000	69%	216.000	83%	259.200	100%	311.040	100%
						Persentase peningkatan peran politik perempuan	0%	-	-	25%	150.000	30%	165.000	35%	181.500	40%	199.650	50%	219.615	
					Kegiatan Pemberdayaan Kader Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Lembaga Legislatif.	Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Lembaga Legislatif.	N/A	-	-	40 Orang peserta	150.000	50 Orang peserta	165.000	60 Orang peserta	181.500	70 Orang peserta	199.650	80 Orang peserta	219.615	





C. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan perubahannya dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan memperhatikan Rencana Strategik yang telah disusun. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu Tahun maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun di dalam RENSTRA. Perjanjian Kinerja Tahunan ditetapkan setiap Tahun dengan berpedoman kepada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh kepala SKPD dengan persetujuan Gubernur Jambi.

Rencana kinerja Tahun 2018 secara lebih detail dapat dilihat pada lampiran formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagaimana terlampir dalam daftar Tabel di bawah ini:



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2018
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terwujudnya situasi politik daerah yang kondusif.	• Terselenggaranya Rakor Bidang Politik Tahun 2018 dan terpantaunya situasi politik Daerah di Provinsi Jambi. • Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pemilu	11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi 210 orang peserta 3 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis.	• Terlaksananya penguatan Kesadaran berbangsa dan bernegara menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. • Meningkatnya Pembinaan Etnis dan Suku. • Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jambi. • Meningkatnya rasa patriotisme dan cinta	80 orang peserta di Provinsi Jambi 80 orang peserta di Provinsi Jambi 100 orang peserta 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi 150 orang peserta 3 Kab/Kota dalam Provinsi



	tanah air kalangan palajar dan generasi muda.	Jambi
3. Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah.	• Meningkatnya kemapanan Partai Politik di Provinsi Jambi. • Termonitor dan terevaluasinya keberadaan eksistensi Parpol di Provinsi Jambi. • Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi. • Terjalinnya kerjasama bidang Kesbangpol dalam Negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi.	100 orang peserta dalam Provinsi Jambi 100 orang peserta dalam Provinsi Jambi 575 orang peserta 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi 32 Organisasi Kemasyarakatan 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi
4. Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif	• Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan Tenaga Kerja Asing (TKA), Peneliti/ Tenaga Ahli Asing, Rohaniawan, LSM Asing (NGO) dan lembaga asing di Provinsi Jambi. • T e r w u j u d n y a pelayanan/penertiban rekomendasi penelitian. • T e r l a k s a n a n y a penanganan konflik oleh Tim Terpadu penanganan konflik sosial. • Terlaksananya koordinasi	Laporan berkala dan insendental 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi Laporan berkala dan insendental Gubernur dan Mendagri 11 Kab/ Kota dalam Prov. Jambi. 60 orang peserta 11



	pemantauan dan fasilitasi pasca konflik di Provinsi Jambi. • Terlaksananya Sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi.	Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. Laporan berkala dan insendental Gubernur dan Mendagri
--	--	--

Jumlah Anggaran :

Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp . 920.945.580,-
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 1. 096.766.613,-
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp. 1. 000.308.200,-
Program Demokrasi yang makin kokoh	Rp. 2. 806.971.290,-

Jambi, Januari 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi

Drs. H. M. Asnawi. AB,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591012 198903 1 003



D. Laporan Capaian Realisasi Kinerja RENSTRA Tahun 2011-2015 Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

Tabel 3.6

REALISASI DAN TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2011-2015 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALSASI										CA HI 3 2
			2011		2012		2013		2014		2015		
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1.	Memelihara dan menghormati kehidupan politik masyarakat yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani yang dicita-citakan.	• Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap situasi politik dalam Provinsi Jambi. • Termonitornya Eksistensi/keberadaan serta permasalahan Ormas,LSM ,OKP dan BEM Prov. Jambi.	160 org peserta.	160 org peserta.	140 org peserta.	140 org peserta.	210 org peserta.	210 org peserta.	360 org peserta.	360 org peserta.	155 org peserta.	155 org peserta.	97
			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100 org peserta	100 org peserta	100 org peserta	100 org peserta	100 org peserta	100 org peserta	140 org peserta	140 org peserta	8



2.	Memelihara dan melestarikan heteroginitas masyarakat yang merupakan potensi kekayaan budaya bangsa untuk tetap menjamin utuhnya NKRI.	• Termonitornya dan terevaluasinya keberadaan eksistensi permasalahan parpol, lsm, okp dan bem.	-	-	560 org peserta	560 org peserta	350 org peserta	350 org peserta	350 org peserta	350 org peserta	350 org peserta	350 org peserta	99
		• Meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya pemilu dan pilkada.	120 org peserta.	120 org peserta.	180 org peserta.	180 org peserta.	210 org peserta.	210 org peserta.	255 org peserta.	255 org peserta.	320 org peserta.	320 org peserta.	99
		• Meningkatnya keamanan partai politik di Provinsi Jambi.	120 org peserta.	120 org peserta.	60 org peserta.	60 org peserta.	60 org peserta.	60 org peserta.	60 org peserta.	60 org peserta.	80 org peserta.	80 org peserta.	99
		• Terwujudnya hubungan yang harmonis antar suku dan etnis.	100 org peserta	100 org peserta	90 org peserta	90 org peserta	70 org peserta	70 org peserta	70 org peserta	70 org peserta	70 org peserta	70 org peserta	85
		• Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya laten.	100 org peserta	100 org peserta	225 org peserta	225 org peserta	-	-	-	-	-	-	1
		• Terlatihnya tenaga	-	-	-	-	250 org	250 org	80 org	80 org	80 org	80 org	8



LAPORAN KINERJA (LKj) Th. 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JAMBI

		pelatihan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah.					peserta	peserta	peserta	peserta	peserta	peserta	
		• Terlaksananya cinta tanah air pada santri.	200 org peserta	200 org peserta	150 org peserta	150 org peserta	-	-	-	-	-	-	1
		• Meningkatnya rasa cinta tanah air di kalangan, pelajar dan Mahasiswa.	-	-	210 org peserta	210 org peserta	165 org peserta	165 org peserta	110 org peserta	110 org peserta	110 org peserta	110 orang peserta	8
		• Terlaksananya sosialisasi TMMD ke-94 dan ke-95 di 2 kodim di Provinsi Jambi.	-	-	400 org peserta	400 org peserta	400 org peserta	400 org peserta	400 org peserta	400 org peserta	400 org peserta	400 peserta	7
		• Terbentuknya individu yang memahi karakter jati diri bangsa dan tetap berpedoman pada pancasila sebagai dasar negara.	-	-	-	-	170 org peserta	170 org peserta	120 org peserta	120 org peserta	120 org peserta	120 orang peserta	7
		• Diperolehnya penetapan indikator nasional (IDI).	-	-	-	-	50 org peserta	50 org peserta	50 org peserta	50 org peserta	-	-	6



LAPORAN KINERJA (LKj) Th. 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JAMBI

3.	Mantapnya wawasan kebangsaan sebagai perekat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.	• Terselenggaranya pembinaan dan pemantauan kegiatan orang asing, TKA Peneliti Asing, LSM Asing, Rohaniawan Asing.	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota
		• Terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama, melalui Forum Komunikasi Umat Beragama.	42 org peserta	42 org peserta	200 org peserta	200 org peserta	200 org peserta	200 org peserta	100 org peserta	100 org peserta	100 org peserta	100 org peserta	100 org peserta
		• Terlaksananya sosialisasi SOP Pemulihan pasca konflik	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota
		• Tersosialisasinya permen dagri nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar, mahasiswa, pemuda dan tokoh masyarakat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 org peserta	160 org peserta



LAPORAN KINERJA (LKj) Th. 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JAMBI

4.	Memelihara kewaspadaan nasional di daerah agar terhindar dari upaya pemecahbelaan bangsa (disintegarsi bangsa).	• Terlaksananya Pengamanan gangguan keamanan dalam Provinsi Jambi. • Terdatanya dan tersusunya permasalahan dan jumlah unjuk rasa di Provinsi Jambi. • Terwujunya pelayanan/rekomendasi penelitian.	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	8
			50 orang peserta	50 orang peserta	50 orang peserta	50 orang peserta	50 orang peserta	50 orang peserta	50 orang peserta	330 orang peserta	330 orang peserta	330 orang peserta	330 Orang Peserta	6
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



E. Laporan Capaian Realisasi Kinerja RENSTRA Tahun 2016-2021 Badan Kesbangpol Provinsi Jambi (Tahun Awal RENSTRA Tahun 2016).

Tabel 3.7

Capaian RENSTRA Tahun 2016-2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI TAHUN 2018		Capaian s/d 31 Des 2018
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya situasi politik daerah yang kondusif.	- Terselenggaranya Rakor Bidang Politik Tahun 2018 dan terpantaunya situasi politik Daerah di Provinsi Jambi. - Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pemilu	11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi 210 orang peserta 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	55 orang peserta Rakor dan 36 orang peserta Rapat Internal Tim Pemantauan Politik Daerah di 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. 600 orang peserta 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	97,84 %
2.	Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis.	- Terlaksananya penguatan Kesadaran berbangsa dan bernegara menunjung tinggi nilai nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. - Meningkatnya Pembinaan Etnis dan Suku. - Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jambi.	80 orang peserta di Provinsi Jambi 80 orang peserta di Provinsi Jambi 100 orang peserta 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	80 orang peserta di Provinsi Jambi 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi 100 orang peserta 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	97,71 %



		Meningkatnya rasa patriotisme dan cinta tanah air dikalangan palajar dan generasi muda.	150 orang peserta 2 Kodim dan 4 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	340 orang peserta 2 Kodim dan 4 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	
3.	Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah.	- Meningkatnya kemapanan Partai Politik di Provinsi Jambi. - Termonitor dan terevaluasinya keberadaan eksistensi Parpol di Provinsi Jambi. - Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi. - Terjalinnya kerjasama bidang Kesbangpol dalam Negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi.	100 orang peserta dalam Provinsi Jambi 100 orang peserta dalam Provinsi Jambi 575 orang peserta 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi 32 Organisasi Kemasyarakatan 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi	150 orang peserta dalam Provinsi Jambi 300 orang peserta dalam Provinsi Jambi 600 orang peserta 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi 39 Organisasi Kemasyarakatan 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi	99,71
4.	Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif	- Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan Tenaga Kerja Asing (TKA), Peneliti/ Tenaga Ahli Asing, Rohaniawan, LSM Asing (NGO) dan lembaga asing di Provinsi Jambi. - Terwujudnya pelayanan/penertiban rekomendasi penelitian.	Laporan berkala dan insendental 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	Laporan berkala dan insendental 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	99,72



		• Terlaksananya penanganan konflik oleh Tim Terpadu penanganan konflik sosial. • Terlaksananya koordinasi pemantauan dan fasilitasi pasca konflik di Provinsi Jambi. • Terlaksananya Sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi.	Laporan berkala dan insenditil Gubernur dan Mendagri 11 Kab/ Kota dalam Provinsi Jambi. 60 orang peserta 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. Laporan berkala dan insenditil Gubernur dan Mendagri	Laporan berkala dan insenditil Gubernur dan Mendagri 11 Kab/ Kota dalam Provinsi Jambi. 60 orang peserta 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi. Laporan berkala dan insenditil Gubernur dan Mendagri	
--	--	---	---	---	--

F. Laporan Hasil kegiatan dan Realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2018

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang dikembangkan dari indikator kinerja program / kegiatan yang Renstra Tahun 2016-2021, Indikator kinerja tersebut beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya Tahun 2018 dapat diuraikan dibawah ini :

Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja *Input*, *Output* dan *Outcome* antara yang direncanakan dengan realisasinya atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.



Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program / kegiatan strategik Renstra Tahun 2016-2021 Indikator kinerja sasaran strategik beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya diuraikan dibawah ini :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yaitu Terwujudnya situasi politik daerah yang kodusif, Pelaksanaan kegiatan politik diaplikasikan dalam kegiatan koordinasi forum diskusi politik dan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Rakor Perkembangan Politik Daerah.

Program ini memiliki dana yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2018 sebesar Rp. 920.945.580-, Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 97,79 % dengan realisasi keuangan sebesar 900.574.922,- dengan Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik.

Kegiatan ini berbentuk sosialisasi mengenai Undang-undang Politik Bagi kalangan Perempuan dan Sosialisasi Etika dan Budaya Politik.

Sosialisasi undang-undang politik bagi kalangan perempuan dan sosialisasi etika dan budaya politik bagi pemilih pemula merupakan salah satu kegiatan pada Bankesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2018 dalam upaya meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendidikan politik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan



politik dan kenegaraan serta meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih pada pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya akan dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemilu, peserta dan petugas mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politis dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang pendidikan politik yang baik dan benar sebagai bekal dalam menghadapi tantangan kehidupan demokrasi yang makin kompleks, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang politik, serta ikut menyukseskan penyelenggaraan pilkada Tahun 2019.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan pengetahuan dan pemahan kepada masyarakat bahwa untuk ikut dalam proses politik merupakan suatu kewajiban warga negara, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu Legislatif dan Pimulukada, Terciptanya iklim politik yang kondusif, karena adanya rasa kebersamaan, Meningkatkan angka partisipasi kaum perempuan dan pemilih pemula di bidang politik serta meningkatkan kualitas pemilih dalam menentukan pilihan secara berkualitas dan cerdas dan hubungan yang harmonis antara elemen masyarakat yang terlibat didalamnya, sehingga penyelenggaraan Pemilukada dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan: Dilaksana di 7 (tujuh) kali di Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi yaitu 1 Kali di Kabupaten Bungo, 1 kali di Kabupaten Tebo, 1 kali di Kabupaten Sungai Penuh, 1 kali di Kabupaten Batanghari, 1 Kali Rakor Forkopimda di Provinsi Jambi, 1 Kali di Kabupaten Merangin, 1 kali di Kabupaten Sarolangun.



Waktu pelaksanaan:

Tanggal 07 Mei 2018 Tahun 2018 di Kabupaten Bungo dengan tema Sosialisasi Undang-undang Politik.

Tanggal 09 Mei 2018 Tahun 2018 di Kabupaten Tebo dengan tema Sosialisasi Undang-undang Politik.

Tanggal 18 Juli 2018 Tahun 2018 di Kabupaten Sungai Penuh dengan tema Sosialisasi Undang-undang Politik.

Tanggal 29 November 2018 Tahun 2018 di Kabupaten Batanghari dengan tema Sosialisasi Undang-undang Politik.

Tanggal 06 Desember 2018 Tahun 2018 di Provinsi Jambi dengan tema Sosialisasi Undang-undang Politik.

Tanggal 11 Desember 2018 Tahun 2018 di Kabupaten Merangin dengan tema Sosialisasi Undang-undang Politik.

Tanggal 12 Desember 2018 Tahun 2018 di Kabupaten Sarolangun dengan tema Sosialisasi Undang-undang Politik.

Peserta kegiatan:

Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Politik bagi Pemilih Perempuan dengan Jumlah peserta 80 Orang yang terdiri dari parpol, Ormasy, LSM, OKP, Perguruan tinggi dan ibu rumah tangga. 97,10% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 572.723.994,-.

b. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Rakor Perkembangan Politik Daerah.

Kegiatan ini berbentuk Rapat Koordinasi mengenai pemantauan perkembangan politik daerah dan persiapan pilkada serentak Tahun 2019 di Provinsi Jambi.

Tujuan untuk Mensinkronisasi program dan kegiatan bidang politik baik ditingkat pusat, provinsi hingga ke Kab/Kota dalam Provinsi Jambi dan



Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat melalui pendidikan politik yang berkarakter kebangsaan.

Pelaksanaan kegiatan dan Waktu pelaksana: Di Aula Bankesbangpol provinsi Jambi. Diawali dengan rapat internal Tim Pemantauan Rakor sebanyak 4 kali dan Perkembangan Poltik Daerah yang dilaksaknakan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun.

Peserta kegiatan:

Terdiri dari Tim Pemanatau Perkembangan Politik Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari Kaban Kesbagpol Kab/Kota Provinsi Jambi, Ketua/Sekretaris KPU Kab/Kota dalam Provinsi Jambi, Ketua /Sekretaris Panwaslu Kab/Kota Provinsi Jambi.

Dengan realisasi kegiatan sebesar 99.02% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 327.850.928,-.

2.Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan adanya hubungan kemitraan dan fasilitasi antara pelajar,tokoh agama dan tokoh masyarakat, dimana dalam hubungan kemitraan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dan kedaulatan rakyat sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dalam target indikator kinerja. Dana yang menunjang program ini bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2018 sebesar Rp. 1.096.766.613,-.Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 98,67 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.082.189.985,- dengan Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Peningktan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.



Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang diadakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Povinsi Jambi sebagai salah satu wadah untuk menumbuh kembangkan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jambi .Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ini pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018. Melalui Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan peran dan fungsi FPK dalam meningkatkan cinta tanah air dan kebangsaan. Melaui forum ini diharapkan dapat menyamakan langkah persepsi dan pola pikir, pola sikap, pola tindak terhadap setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Guna menciptakan situasi aman, kondusif, tertib sesuai dengan menuju Jambi TUNTAS 2016-2021 dalam membangun Provinsi Jambi kedepan.

Peserta :

Terdiri dari perwakilan kesbangpol Kab/ Kota dalam Provinsi Jambi, tokoh agama, tokoh Adat dan Masyarakat dan Pengurus FPK Provinsi Jambi. Dengan realisasi kegiatan sebesar 97,60% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 158.927.270,-.

b. Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan berpedoman Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Adapun tema kegiatan pusat pengembangan wawasan kebangsaan untuk tahun 2019 adalah "Melalui kegiatan PPWK guna terwujudnya tenaga profesional dalam penguatan pendidikan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menuju JAMBI TUNTAS 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2018 Aula Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Drs. H. M. Asnawi, AB, MM. Kegiatan ini terdiri dari 70



(tujuh puluh) orang peserta yang berasal dari Guru SLTP, Guru SLTA, Dosen, Civitas Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan persepsi, pola pikir dan sikap terhadap upaya pelestarian dan peningkatan wawasan kebangsaan, dimana pada saat ini nilai-nilai kebangsaan yang semakin meluntur. Pemahaman terhadap nilai – nilai kebangsaan sangatlah penting, agar nilai – nilai kebangsaan tidak memudar, karena disadari atau tidak struktur sosial politik dan demokrasi mempunyai efek pada tingkat nasional maupun daerah, dengan realisasi kegiatan sebesar 99.85% atau realisasi keuangan sebesar Rp. 150.889.015,-.

c. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara.

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara bagi generasi muda sehingga tumbuh rasa cinta tanah air dan patriotisme . kegiatan Sosialisasi Dukungan TMMD dilaksanakan di Kabupaten Tebo ulu dengan peserta 80 orang yang terdiri dari Masyarakat Desa, Kabupaten Pemenang yang dilaksanakan di Balai Desa Tanah Abang, dengan masing masing di ikuti peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang terdiri dari masyarakat desa.

Tanggal 23 Februari 2018 sosialisasi bela negara di Kabupaten Marangin yang dilaksanakan di aula PKK Merangin dengan peserta 70 Peserta yang terdiri dari pelajar. Tanggal 6 maret 2018 dilaksanakan sosialisasi peningkatan Bela negara yang dilaksanakan di Aula Hotel Arafah sungai penuh dengan peserta 70 (Tujuh Puluh) peserta yang terdiri dari pelajar.

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara, dengan realisasi kegiatan sebesar 99,23% atau realisasi keuangan sebesar Rp.520.519.200,-.



d. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Menciptakan Keharmonisan Antar Umat.

Pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat dengan output terbina Kerukunan Umat Beragama di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Terlaksananya rapat internal kepengurusan Pembinaan Kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat beragama dilaksanakan di Aula Kesbangpol Provinsi Jambi dengan jumlah peserta 100 (seratus). guna menjalin silaturahmi antar sesama dan memantau perkembangan di FKUB. Meningkatnya kepengurusan FKUB yang tujuan dilaksanakan pertemuan supaya tidak adanya perselisihan antar`agama dan terwujudnya kerukunan antar umat beragama.

Rapat koordinasi FKUB Se-Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018 di Aula Bakesbangpol Provinsi Jambi. Adapun peserta kegiatan Rakor FKUB ini diikuti oleh para pengurus FKUB, Dewan Penasehat FKUB dan Pengurus FKUB Kabupaten/kota Kesbangpol Provinsi Jambi.

Pada tahun 2018 terealisasi sebesar 97,52% dan realisasi keuangan sebesar RP.251.854.500,-.

3.Program Perwujudan Demokrasi Yang Makin Kokoh.

Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yaitu Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah dengan total



dana dalam program ini berasal dari APBD Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar 98,62% berjumlah Rp 1.782.093.800,-, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik Bagi Lembaga Parpol.

Dalam Kegiatan Peningkatan dan pengembangan Kualitas Politik bagi kader dan lembaga Parpol dengan Output persiapan bagi kader dan lembaga politik yaitu mengadakan rapat internal verifikasi yang berkaitan dengan kelancaran proses dan pertanggung jawaban (SPJ) bantuan Parpol.

Kegiatan Pembinaan teknis bantuan Keuangan Parpol bermaksud Meminimalisir kesalahan administrasi laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan bagi partai politik dalam penyesuaian dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya menyamakan persepsi peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia

Kegiatan rapat koordinasi proses bantuan keuangan partai politik diadakan di Kabupaten Merangin dilaksanakan hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dilaksanakan di Aula Kesbangpol kabupaten Merangin, Narasumber dalam kegiatan Rapat dan koordinasi ini, BPKAD Kabupaten Merangin, Kabid OPK dan LP. Adapun para peserta dalam kegiatan ini berjumlah 50 (lima puluh) orang terdiri dari Tim Verifikasi, ketua, pengurus partai politik di Kabupaten Merangin. Rapat koordinasi proses bantuan keuangan partai politik yang kedua dilaksanakan di Provinsi Jambi hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di Aula Kesbangpol Provinsi Jambi, Narasumber dalam kegiatan ini Dirjen Polpum dari Jakarta DR.Drs. H. Andi Muhammad Yusuf, M.Si, Inspektur Pembantu Wilayah 2 Provinsi Jambi, Kabid OPK dan LP, Bakeuda Provinsi Jambi, Kasubid Fasilitasi Organisasi Politik



lembaga perwakilan, peserta dalam kegiatan ini sebanyak 50 (lima puluh) orang terdiri dari Tim Verifikasi dan Ketua, pengurus partai politik.

Hasil dari kegiatan ini dapat memberikan informasi tentang persyaratan pengajuan bantuan keuangan dan kelengkapan administrasi permohonan bantuan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, membahas hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Jambi tentang pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik, membahas tentang permendagri nomor 77 tahun 2014.

dengan realisasi anggaran sebesar 96,02 % atau realisasi keuangan sebesar Rp. 195.384.446,-.

b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas dan OKP dan Lembaga Keagamaan/perwakilan di Daerah.

Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi keberadaan / eksistensi Parpol, Ormas, LSM, OKP dan Lembaga Keagamaan diharapkan dapat tersalurkan aspirasi lembaga kemasyarakatan, Ormas, LSM, okp dan Lembaga Keagamaan agar tersalur aspirasi masyarakat dan aspirasi peraturan perundang undangan dan kebijakan di bidang ormas.

Kegiatan monitoring dan evaluasi keberadaan /eksistensi Parpol dilaksanakan dalam bentuk Rapat koordinasi eksistensi Parpol dan Kemitraan LSM, OKP dan Ormas Provinsi Jambi. Sasaran dari kegiatan ini lembaga kemasyarakatan, ormas, LSM, Okp dan Lembaga Keagamaan Provinsi yang dilaksanakan di kabupaten Tebo dilaksanakan pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018 dan Provinsi



Jambi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 dengan jumlah peserta masing-masing kegiatan sebanyak 60 (enam puluh) Orang peserta.

Dengan realisasi anggaran sebesar 98,92 % atau realisasi keuangan sebesar Rp. 125.134.244,-.

c. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi.

Pelaksanaan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi/seminar/dialog dll, dimana tahun 2018 dilaksanakan 1 (dua) kali kegiatan di Provinsi Jambi dan 5 (lima) kali di Kabupaten Kota di Provinsi Jambi dengan tema Sbb:

- Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 42 Tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas menjadi undang-undang.

Kegiatan pembinaan Ormas Provinsi Jambi dengan output meningkatkan peran Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong dan meningkatkan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk lebih berperan aktif dalam menunjang program pemerintah serta mengantisipasi keberadaan/eksistensi serta penyelesaian permasalahan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi.

Melalui Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dalam menunjang program pemerintah menghadapi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Tahun 2018. Dimana ormas yang terdaftar Di Provinsi Jambi lebih kurang 502 Ormas, Ormas yang aktif 187 Ormas dan Ormas tidak aktif 315 Ormas.



Pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut tahun 2018 dapat dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi diantara lain :

a. Kabupaten Kerinci

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Kabupaten Kerinci di laksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 dengan 100 (seratus)orang peserta yang terdiri dari organisasi masyarakat dan OKP.

b. Provinsi Jambi

Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Provinsi Jambi di laksanakan pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2018. bertempat di Aula Bankesbangpol Provinsi Jambi dengan peserta 100 (seratus) ormas.

c. Kabupaten Tebo

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Kota Jambi dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 April 2018 dengan peserta 100 (seratus) orang.

d. Kabupaten Muaro Jambi

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan pada hari selasa Tanggal 15 Mei 2018 dengan peserta 100 (seratus) orang Ormas.

e. Kota Jambi



Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Provinsi Jambi di laksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, dengan peserta 100 (seratus) dari 100 (seratus) Ormas.

f. Kabupaten Sungai Penuh

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Kabupaten Sungai Penuh dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dengan peserta 100 (seratus) orang.

g. Kabupaten Merangin

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Provinsi Jambi di laksanakan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, dengan peserta 100 (seratus) .

Dengan realisasi anggaran sebesar 98,67 % atau realisasi keuangan sebesar Rp. 367.784.504,-.

d. Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi.

Dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Peranan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya memiliki kewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Untuk mengoptimalkan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya.

Sebagai gambaran Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di jajaran Kesbangpol berjumlah lebih kurang 65.577, di Kementerian Sosial



berjumlah lebih kurang 25.406, yayasan dan Perkumpulan yang terdaftar di Kemenkumham berjumlah lebih kurang 48.866 dan ini belum termasuk ormas yang didirikan WNA yang terdaftar pada Kementerian Luar Negeri. Jumlah yang cukup besar ini tentunya memerlukan penanganan yang komprehensif baik yang dimulai dari proses pendaftaran maupun ketika Organisasi Kemasyarakatan tersebut melakukan aktifitas di ruang publik, dalam negara berdasarkan hukum (*rechthstaat*), setiap orang baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif, yang melakukan aktivitas memasuki wilayah publik, menimbulkan hak (kewenangan) negara (Pemerintah) untuk mengaturnya supaya terwujudnya ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam hal tersebut Pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, perlu adanya pola kerjasama, ini dilandasi oleh kepentingan nasional yang berdampak positif terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang Pedoman kerjasama departemen Dalam Negeri Subtansi proposal harus relevan dengan penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, yaitu :

- a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Kewaspadaan Nasional;
- c. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- d. Politik Dalam Negeri; dan
- e. Ketahanan Ekonomi.



Maksud dari kerjasama antar Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan sinergisitas antara pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya.

Tujuan dari kegiatan ini Terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, Meningkatkan partisipasi dan peran Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam negeri, Terkelolanya hak dan kewajiban warga negara dalam berserikat dan berkumpul, Terciptanya kesadaran kolektif warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memantapkan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Dengan realisasi anggaran sebesar 99,05 % atau realisasi keuangan sebesar Rp. 1.093.790.606,-.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yaitu Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dengan total dana dalam program ini berasal dari APBD Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp 1.000.308.200,-.

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 99,46% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 994.882.425,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



a. Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam Memelihara Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dengan Dasar Hukum Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, pada Tahun 2018 mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 348.645.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.348.645.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %. Untuk Tahun 2016 mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.401.645.000,- terealisasi sebesar Rp.354.480.000,- atau sebesar 88,25 % dengan realisasi kegiatan sebesar 88,25 % . Tidak tercapainya target realisasi anggaran dikarenakan adanya pengurangan dan rasionalisasi pagu anggaran tahun 2018.

Adapun output dari kegiatan ini adalah deteksi dini, cegah dini, tangkal dini dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia sehingga tercipta rasa aman dan tenteram dilingkungan masyarakat. Melaksanakan kegiatan:

- Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Pelajar, Pemuda, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat di Kota sunga penuh dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang terdiri dari: Pelajar, mahasiswa, Camat, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, FKDM Kabupaten Sarolangun, FKDM Kecamatan, Media Massa, Kominda.
- Sosialisasi Pedoman Kerja Tentang Sistem Peringatan Dini Secara Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2018 dilaksanakan di Kabupaten Merangin dengan



jumlah peserta sebanyak 100 orang terdiri dari: Pelajar, mahasiswa, Camat, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, FKDM Kabupaten Sarolangun, FKDM Kecamatan, Media Massa, Kominda.

- Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Pelajar, Pemuda, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang terdiri dari: Pelajar, Mahasiswa, Camat se Kab Merangin, TOKOH Pemuda, Tokoh Masyarakat, FKDM Kabupaten Merangin, Kominda.
- Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Pelajar, Pemuda, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Kerinci yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang terdiri dari: Pelajar, Mahasiswa, Tokoh Pemuda, Tokoh masyarakat, FKDM Kabupaten Tebo, Kominda, Dalam kegiatan ini bertujuan untuk Mengoptimalisasi peran tim Terpadu penanganan dan konflik sosial dan peran serta masyarakat dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial khususnya pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme, peningkatan koordinasi, konsolidasi serta sinergitas antar unsur pelajar, mahasiswa, pemuda dan tokoh masyarakat dengan pemda dalam rangka menyikapi ancaman bahaya radikalisme dan terorisme ditengah tengah masyarakat, Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peserta dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan keterpaduan dalam pencegahan dan pengangulangan bahaya radikalisme dan terorisme.



- **Rapat Internal FKDM.**

Kegiatan Rapat Internal FKDM Provinsi Jambi dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun yang membahas langkah-langkah deteksi dini, cegah dini dan antisipasi dini dalam menjaring, menampung, menganalisis pelaporan informasi dari masyarakat mengenai berbagai potensi ancaman serta mengkoordinasikan dengan Instansi terkait di daerah, Kominda, FKUB dan FPK sebagai mitra kerja FKDM dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya secara dini.

**Daftar Rekapitulasi Pembentukan FKDM Kab/Kota, Kecamatan dan
Desa/Kelurahan se-Provinsi Jambi
Tahun 2017**

NO	KAB/KOTA	TK. KAB/KOTA		TK. KECAMATAN		
		SDH	BLM	JML KEC	SDH	BLM
1	KOTA JAMBI	SDH	-	8	2	6
2	KAB. BATANGHARI	SDH	-	8	8	-
3	KAB. MUARO JAMBI	SDH	-	11	11	-
4	KAB. BUNGO *)	SDH	-	17	17	
5	KAB. TEBO	SDH	-	12	4	8
6	KAB. MERANGIN *)	SDH	-	24	24	
7	KAB. SAROLANGUN	SDH	-	10	10	



8	KAB. KERINCI	SDH	-	16	-	16
9	KAB. SUNGAI PENUH	SDH	-	8	-	8
10	KAB. TANJAB BARAT	SDH	-	13	13	-
11	KAB. TANJAB TIMUR	SDH	-	11	11	
catatan : *) Kab.Bungo dan Merangin telah terbentuk sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan						

b. Kegiatan Penerbitan/Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi Penelitian.

Kegiatan Penerbitan/Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi Penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian mendapat alokasi dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 29.484.000,- . Pada tahun 2018 telah terbit sebanyak 180 rekomendasi penelitian, dengan realisasi kegiatan sebesar 97,42 % atau realisasi keuangan Rp. 28.722.000,-.

c. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial.

Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jambi Tahun 2015 (Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial) mendapat alokasi dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 sebesar **Rp. 639.871.000,-** dan pada Tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.413.72.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.345.976.000,- atau sebesar 83,62 % sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 95 %.



Tahun 2017 pagu anggaran Rp.311.676.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Tahun 2018 pagu anggaran Rp.285.962.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar Rp.285.866.500,- sebesar 99,97.

d. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing.

Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing dengan output pemantauan kegiatan orang asing, TKA , peneliti asing, kunjungan / lalu lintas orang asing di daerah, outcome berupa Rakor, konsultasi dan koordinasi tingkat provinsi dan kab/kota dan Rakornas pemantauan orang asing, impact lalu lintas dan adanya pemantauan situasi keamanan dan ketentraman kegiatan orang asing di 11 kab/kota dalam Provinsi Jambi serta melaksanakan rakor pemantauan orang asing , LSM asing dan Lembaga asing . Merumuskan solusi pemecahan masalah sebagai bahan untuk direkomendasikan kepada gubernur Jambi dalam pengambilan kebijakan/keputusan dalam hal penanganan orang Asing. Diharapkan kedepan dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait diantaranya Dinas Sosial dan tenaga Kerja dan TIM PORA (Tim Pemantauan Orang Asing) . Pekerja asing diwilayah Provinsi Jambi bekerja pada 32 perusahaan berasal dari 14 Negara yaitu Negara Malaysia, China, Kanada, India, Filipina, Perancis, Taiwan, Jepang, Thailand, Taiwan, Singapore, USA.

Tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Kabupaten Tanjung Jabung timur jumlah peserta 60 (enam puluh) mengadakan sosialisasi perm, endagri Nomor 49 tahun 2010 tentang pemetaan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing di daerah terdiri dari pimpinan



perusahaan, dinas dukcapil, dinas pendidikan, dinas penanaman modal, bagian ekonomi, para camat, unsur kopimda, FKDM, FKUB, dan FPK .

Tanggal 6 Desember 2018 di laksanakan di Kabupaten Kerinci jumlah peserta 60 (enam puluh) orang terdiri dari Tomas, pelajar, camat, mahasiswa, tokoh adat dan tokoh agama.

Adapun realisasi kegiatan Pembinaan dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing 99,57 % atau realisasi keuangan sebesar Rp.146.274.022,-.

e. Kegiatan Pemantauan dan Pemetaan Potensi Konflik di Provinsi Jambi.

Kegiatan Pemantauan dan Pemetaan Potensi Konflik di Provinsi Jambi Tahun 2018 dengan outcome terpetakannya potensi konflik, terpantaunya konflik dan terfasilitasinya penyelesaian konflik di wilayah Provinsi Jambi, dengan realisasi fisik kegiatan 99,66 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.112.604.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.112.986.000,-.

Adapun output kegiatan ini adalah koordinasi dengan Kesbangpol dan Kab/kota dalam Provinsi Jambi dan Instansi terkait di daerah sehingga masyarakat dapat bekerjasama menjaga kebersamaan kehidupan bermasyarakat dan menjaga kebersamaan kehidupan masyarakat untuk pencegahan, pemantauan dan penyelesaian konflik serta penciptaan situasi kantramtibmas yang kondusif di kabupaten /kota se Provinsi Jambi. Konflik yang terjadi di Provinsi Jambi selama ini selalu bersumber dari Poleksosbud, sara, batas wilayah dan sumber daya alam.



Pada Tahun 2018 berdasarkan data potensi konflik per Kecamatan dari Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang disampaikan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terdapat jumlah potensi konflik di Provinsi Jambi sebanyak 105 (seratus lima) potensi konflik yang terdiri dari :

	Lokasi Potensi Konflik Kab/Kota	Jenis Potensi Konflik	Jumlah potensi Konflik	Ket
1	2	3	4	5
1.	Kerinci	Sumber daya Alam Politik & Batas Adm Sara Ekonomi	0 0 1 0	-
2	Kota Sungai Penuh	Sumber daya Alam Politik & Batas Adm Sara Ekonomi	0 1 3 0	-
3.	Merangin	Sumber daya Alam Politik & Batas Adm Sara Ekonomi	3 0 1 0	-
4	Sarolangun	Sumber daya Alam Politik & Batas Adm Sara Ekonomi	10 1 0 0	- -
5.	Bungo	Sumber daya Alam Politik & Batas Adm Sara Ekonomi	6 13 2 2	- -
6	Tebo	Sumber daya Alam Politik & Batas Adm Sara Ekonomi	2 2 1 0	- - -
7.	Tanjab Barat	Sumber daya Alam Politik & Batas Adm Sara Ekonomi	2 1 0 0	- -
8.	Tanjab Timur	Sumber daya Alam Politik & Batas Adm	9 2	- -



		Sara Ekonomi	0 0	
9.	Batanghari	Sumber daya Alam Politik & Batas Adm Sara Ekonomi	3 0 0 0	- - -
10.	Muaro Jambi	Sumber daya Alam Politik & Batas Adm Sara Ekonomi	8 4 0 0	- - -
11.	Kota Jambi	Sumber Daya Alam Politik & Batas Adm Sara Ekonomi/Industrial	0 0 1 1	
Jumlah Potensi Konflik			71	-

f. Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi.

Guna mencegah Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta terwujudnya Jambi Tuntas Badan Kesbangpol Provinsi Jambi menggelar Pembinaan organisasi kemasyarakatan dan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Kaban Kesbangpoll Provinsi Jambi Drs. H. M. Asnawi, AB, MM mengatakan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini tentunya bisa mengajak organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan kondisi yang kondusif, serta mencegah munculnya dan masuknya Narkoba ke Provinsi Jambi.

Peserta yang hadir bisa bertukar informasi langsung bersama Narasumber baik BNN, Kapolres, dan Kesbangpol terkait pencegahan , Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Jambi Tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di



Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan tanggal 20 Maret 2018 dengan peserta berjumlah 80 (delapan puluh) orang.
dengan realisasi kegiatan sebesar 98,84% atau realisasi keuangan sebesar Rp. 115.464.400,-.

G. Hambatan dan Solusi Kegiatan Tahun 2018.

Beberapa hambatan yang terjadi pada tahun 2018 yaitu pada :

1) Program Pendidikan Politik Masyarakat.

- **Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik.** Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah : Bahwa Pelaksanaan forum diskusi politik masih mengalami kendala karena masih ada kabupaten/kota yang belum melaksanakan kegiatan pendidikan politik masyarakat, karena masih terbatasnya anggaran yang tersedia Kabupaten/Kota tersebut. Untuk itu diharapkan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mengadakan kegiatan Sosialisasi di Kabupaten /Kota sebagai bahan koordinasinya. Belum Optimalnya pelaksanaan Pendidikan Politik



terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.

Belum Optimalnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang undang-undang politik, etika dan budaya politik sehingga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu masih kurang. Solusi yang dibuat perlunya peningkatan kegiatan Sosialisasi undang-undang , Etika dan budaya politik di kalangan masyarakat khususnya di tingkat kabupaten terutama di masyarakat di perbatasan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan menambah jumlah peserta dari kalangan pemilih pemula dan perempuan (gender).

- **Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Rakor Perkembangan Politik Daerah.** Hambatan Dalam pelaksanaan Kegiatan ini adalah : masih terdapatnya perbedaan persepsi antar stake holder dalam menjabarkan suatu aturan dan adanya perbedaan momenklatur pada tiap –tiap Kesbangpol maupun Kota dalam Provinsi Jambi dengan solusi yang diharapkan agar adanya koordinasi yang sinergis antar Kesbangpol dan Stake Holder terkait.

2) Program Perwujudan Demokrasi Makin Kokoh.

- **Kegiatan Peningkatan dan pengembangan Kualitas proses politik bagi lembaga parpol.** Hambatan dalam kegiatan ini adalah masih banyak diantaranya masih ditemukan laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari beberapa parpol yang belum lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat Provinsi Jambi.** Hamabatan dalam Kegiatan Ini Adalah untuk aplikasi

Ormasy dan LSM sudah tersedia jaringan internet, hanya saja tidak bisa di akses dengan baik dikarenakan

- jaringan yang ada tidak mampu untuk mengakses data yang ada. Sehingga laporan Ormasy, LSM ke Pusat tidak dapat berjalan dengan maksimal. Solusi yang diharapkan ke depan diharapkan adanya jaringan khusus berkenaan dengan masalah tersebut.
- **Kegiatan Pemantauan, monitoring dan evaluasi keberadaan / eksistensi Orpol, Ormas, LSM, OKP dan Lembaga Keagamaan.** Hambatan dalam kegiatan ini adalah Secara khusus terdapat beberapa hal berkaitan dengan pendataan data base secara menyeluruh terutama atas keberadaan dan eksistensi parpol, Ormas, OKP di Provinsi Jambi terutama dalam memfasilitasi tujuan dan sasaran dari masing-masing Orpol/Ormas, OKP se Provinsi Jambi. Dengan solusi diupayakan peningkatan langkah-langkah efektivitas dan efisiensi program/kegiatan yang bersinergi antar pemerintah dengan Ormasy, LSM, OKP se provinsi Jambi. Tidak ada pemberitahuan perpindahan sekretariat OKP , Ormas , LSM dan lembaga keagamaan sehingga sulit untuk berkoordinasi dan bekerjasama. Solusi yang diharapkan melakukan koordinasi dengan kesbangpol Kab/Kota dan memberikan himbauan lewat media massa agar OKP , Ormas, LSM dan Lembaga untuk segera registrasi ulang bagi yang sudah habis masa berlaku SKTnya.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban.



- **Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :**
 - Belum adanya kendaraan operasional bagi pengurus FKDM untuk melakukan pembinaan FKDM Kab/Kota se-Provinsi Jambi Dengan solusi kedepan dapat tersedia sarana pendukung/kendaraan operasional.
 - Belum maksimalnya Pelaporan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) oleh Kabupaten/kota secara periodik kepada Gubernur C.Q Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Dengan solusi kedepan pelaporan dari masing – masing Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporannnya dengan tepat waktu.
- **Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing, Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :**
 - Belum seluruh perusahaan pengguna tenaga kerja asing melaporkan pekerja/Karyawannya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, dengan solusi akan melakukan Sosialisasi kepada Instansi/Lembaga/Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/yang bermitra dengan peneliti asing untuk mempresentasikan rencana kegiatannya kepada Tim Pemantau Orang Asing Provinsi Jambi.
 - Belum adanya kendaraan dinas operasional untuk memantau keberadaan peneliti asing, tenaga kerja asing yang wilayah

kerjanya dilokasi terpencil (kawasan yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa. Dengan solusi kedepan agar dapat tersedia sarana pendukung untuk Pemantauan Kegiatan Orang Asing tersebut berupa mobil Double Gardan.

- Para peneliti asing belum melaporkan hasil penelitiannya baik berupa laporan berkala maupun laporan akhir penelitian kepada Gubernur Jambi C.q. Bakesbangpol Provinsi Jambi.
- Keterbatasan kemampuan personalia aparatur Kesbangpol yang menangani penelitian tenaga kerja asing, lembaga asing dalam berbahasa asing/Inggris. Solusi kedepan untuk dapat menambah personil pemantau kelapangan yang mampu berbahasa asing/Inggris.

• **Kegiatan Pemantauan dan Pemetaan Potensi Konflik di Provinsi Jambi, Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :**

- Kurangnya aparatur untuk melakukan penyelidikan, pemantau dan mediasi konflik.
- Kurangnya Aparatur kesbangpol yang belum mengikuti diklat intelejen dan mediasi konflik.
- Kurangnya aparatur yang menguasai ITI untuk membuat Peta Rawan Konflik. Dengan Solusi kedepan dapat bertambahnya pegawai yang bisa memahami ITI tentang pembuatan Peta Rawan Konflik .
- Belum maksimalnya Pelaporan Kegiatan Pemantauan Konflik, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota secara periodik kepada Gubernur C.Q Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Dengan solusi



kedepan pelaporan dari masing – masing Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporannya dengan tepat waktu.

- Belum disampaikannya Peta Konflik secara terperinci oleh Kesbangpol Kabupaten/Kota kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

H. Laporan Realisasi Anggaran Per-Program Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

TABEL 3.8
Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2015



No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.365.710.450,-	1.328.786.192,-	97,94 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	558.800.000,-	539.195.376,-	96,49%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	28.000.000,-	25.200.000,-	90,00 %
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	40.000.000,-	39.950.000,-	99,88%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	345.477.400,-	320.489.180,-	92,77%
Jumlah		2.337.987.850,-	2.253.620748,-	95,41 %

TABEL 3.9

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2015**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	639.871.000,-	622.981.300,-	97,36 %



	Lingkungan.			
2.	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	894.821.000,-	795.996.749,-	88,96 %
3.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	343.697.150,-	305.955.350,-	89,02 %
4.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	818.457.000,-	804.823.171,-	98,33%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	305.707.200,-	280.784.300,-	91,85 %
6.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	803.635.700,-	781.566.750,-	97,25 %
7.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	665.194.100,-	639.085.200,-	96,07 %
Jumlah		4.471.383.150,-	4.231.192.820,-	94,12%

TABEL 3.10
Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2016

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.146.853.900,-	1.132.717.454,-	98,77



2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	538.220.000,-	529.348.176,-	98,35
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	32.000.000,-	29.200.000,-	91,25
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	18.182.000,-	18.182.000,-	100
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	338.773.930,-	331.530.302	97,86
Jumlah		2.074.029.830,-	2.040.977.932,-	98,41

TABEL 3.11
Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2016

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	1.229.488.670,-	1.164.602.304,-	94,72
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	1.175.616.200,-	1.169.953.647,-	99,52
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	731.606.200,-	631.173.700,-	86,27
4.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	2.321.596.100,-	1.104.313.353,-	47,57
Jumlah		5.458.307.170,-	4.070.043.004,-	74,57

TABEL 3.12
Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2017

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.037.968.749,-	1.001.678.295,-	96,50



2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	496.360.000,-	477.661.737,-	96,23
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	43.200.000,-	43.200.000,-	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	23.000.000,-	22.298.500,-	96,95
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	337.624.291,-	329.844.000,-	97,70
Jumlah		1.938.153.040,-	1.874.682.532,-	96,73

TABEL 3.13
Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2017

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	1.198.736.570,-	1.171.322.967,-	97,71
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	1.122.351.200,-	1.119.220.385,-	99,72
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	753.856.200,-	737.570.232,-	97,84
4.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	2.052.205.100,-	2.046.197.882,-	99,71
Jumlah		5.127.149.070,-	5.074.311.466,-	98,97

TABEL 3.14
Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2018

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	993.125.870,-	970.735.387	97,75



2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	440.446.447,-	428.384.100,-	97,26
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	56.550.000,-	52.650.000,-	93,10
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	23.000.000,-	23.000.000,-	100
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	316.886.000,-	314.989.148	99,40
Jumlah		1.830.008.317	314.989.148	97,80

TABEL 3.15
Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	1.096.766.613,-	1.082.189.985,-	98,67
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	1.000.308.200,-	994.882.425	99,46
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	920.945.580,-	900.574.922,-	97,79
4.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	1.806.971.290,-	1.782.093.800,-	98,62
	Jumlah	4.824.991.683,-	4.759.741.132,-	98,41

I. Rencana Program dan Pendanaan Tahun Anggaran 2019.

Dalam Pelaksanaan Program/kegiatan Tahun 2019 telah mengacu pada RENSTRA Bankesbangpol Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Jambi



Tahun 2016-2021 Menuju Jambi TUNTAS, adapun program/kegiatan dan Rencana Anggaran dapat dijelaskan pada table di bawah ini :

TABEL 3.16
Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	960.743.000,-	-	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	326.497.000,-	-	-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	48.750.000,-	-	-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	23.000.000,-	-	-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	280.000.000,-	-	-
Jumlah		1.638.990.000,-	-	-

TABEL 3.17
Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	982.368.000,-	-	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	1.850.259.000,-	-	-
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	865.803.000,-	-	-
4.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	1.635.880.000,-	-	-
Jumlah		5.334.310.000,-	-	-

BAB IV

PENUTUP



Dalam memperhatikan garis umum kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tentang Tupoksi uraian tugas Badan Kesatuan dan Politik sesuai dengan visi dan misi melakukan berbagai program dalam upaya menetapkan dan mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat untuk menuju Jambi TUNTAS.

Kegiatan Badan Kesatuan dan Politik pada Tahun 2018 telah melaksanakan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, partai politik, Pemantauan pelaksanaan Pemilu, mengembangkan pendidikan Wawasan Kebangsaan, mengadakan pendeteksian dini dan memfasilitasi penanganan konflik sosial yang ada di masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik baik antara masyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi.

Demikian Laporan kinerja (LKj) Badan Kesatuan dan Politik Tahun 2018, pencapaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 dapat dijadikan cermin yang berharga untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan dan Politik dimasa yang akan datang.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAMBI

Drs. H. Asnawi. AB, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19591012 198903 1 003